

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN AKADEMIK (SIPA)  
DI FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**ICIP PRIANDIKA  
NIM. 110563201173**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2015**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN AKADEMIK (SIPA)  
DI FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
(Icip Priandika, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang)

Abstrak

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) adalah instansi menjalankan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA). SIPA merupakan program akademik yang berbasis *Website*, dimana proses pelaksanaannya dilakukan secara *online* dalam kepengurusan administrasi akademik. Kondisi yang terjadi saat ini mengenai implementasi kebijakan SIPA di FIKP memperlihatkan bahwa implementasi tersebut belum berjalan secara kondusif, yaitu : 1. Tidak berhasilnya SIPA dalam mengatasi permasalahan ketidakvalidan data akademik di FIKP, 2. Adanya ketidakselarasan kewenangan struktur birokrasi akademik, dalam implementasi kebijakan SIPA. Tidak terlaksananya pengembangan program SIPA hingga saat ini dalam mengatasi permasalahan akademik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan SIPA di FIKP. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi implementasi kebijakan SIPA di FIKP. Penelitian ini melihat aspek yang terkandung dalam konsep implementasi yang dikemukakan oleh Edwar III dalam Widodo (2012:96), yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Sumber daya, dan Struktur Birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, dan dimensi Komunikasi sudah terlaksana akan tetapi dari segi konsistensi perintah atau aturannya yang tidak mendukung. Sedangkan dimensi Disposisi sudah terlaksana. Kendala terbesar dalam implelementasi kebijakan SIPA terdapat pada dimensi Sumber daya, dan Struktur Birokrasi, sehingga penyempurnaan kebijakan program SIPA belum bisa dilaksanakan oleh tim pengembangan SIPA. Diperlukan perhatian lebih dan dukungan oleh para pimpinan agar kekurangan-kekurangan dalam pengembangan program kebijakan SIPA tersebut dapat segera teratasi, demi tercapainya tujuan dari kebijakan SIPA sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, SIPA

## **ABSTRACT**

*Faculty of Marine Sciences and Fisheries (FIKP) is an agency run Implementation of Academic Management Information System (SIPA). SIPA is an academic program based Website, where the implementation is done online in the management of academic administration. This condition occurs when the SIPA policy implementation in FIKP shows that the implementation is yet to be conducive, namely: 1. The failure SIPA in overcoming problems in FIKP academic data notting valid, 2. The authority disharmony bureaucratic structure of academic, policy implementation SIPA. Non-performance SIPA program development to date in addressing the academic issues.*

*Formulation of the problem in this research is how the implementation of policies in FIKP SIPA. While the purpose of this study was to determine and identify policy implementation in FIKP SIPA. The research looked at aspects contained in the concept of implementation put forward by Edward III in Widodo (2012: 96), namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used a qualitative research approach, with descriptive research techniques. The research location is the Faculty of Marine Sciences and Fisheries Maritime University Raja Ali Haji. The data collection used is interview, and documentation.*

*The result of this research showed that the resources and bureaucratic structure dimensions have not been running well, and its communication dimension has already done but there is not any support in term of its consistency or regulation. However, the disposition dimension has already been done. The biggest obstacles in the implementation of SIPA policy are in term of its human resources and bureaucratic structure. Therefore, the perfection of SIPA policy has not been able to be done yet by its development team. In order to be able to overcome its flaws and to achieve the objectives of the SIPA policy, better concern and support from the chairmen are needed.*

*Keywords: implementation, policy, SIPA*

## Latar Belakang

Kebijakan SIPA dibuat mengacu kepada PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan, pasal 16 ayat (1) yaitu “...,dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, kementerian mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi”. Diubah dengan PP RI No. 66 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

SIPA merupakan program yang berbasis *Website*, dimana proses pelaksanaannya dilakukan secara *online* dalam kepengurusan administrasi akademik. Adapun tujuan dibuatnya SIPA adalah untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan akademik di UMRAH, sehingga pelaksanaan pengelolaan akademik menjadi valid dari segi data, dan efektif serta efisien dari segi pelaksanaannya. Selain itu SIPA juga merupakan program dasar akademik yang digunakan UMRAH dalam melaksanakan kewajibannya

untuk pelaporan data akademik ke DIKTI yang disebut dengan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

Pemahaman tersebut berkaitan dengan Keputusan Menteri No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana di perguruan tinggi, yang tercantum pada pasal 5 yaitu setiap perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada DIKTI dan Kopertis. Keberadaan SIPA diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan akademik di UMRAH.

Pengelolaan akademik adalah kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan proses akademik. Proses akademik yang dimaksud adalah registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi adalah proses pembayaran Sumbangsih Pembinaan Pendidikan (SPP) sampai proses aktifasi mahasiswa. Aktifasi mahasiswa adalah proses pengaktifan

mahasiswa di dalam program SIPA setelah pelaksanaan pembayaran SPP. Sedangkan registrasi akademik adalah pelaksanaan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) hingga pelaksanaan pencetakan nilai semester yaitu pencetakan Kartu Hasil Studi (KHS).

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) merupakan fakultas yang terdapat di lingkungan UMRAH (SK Yayasan Pendidikan Provinsi Kepri No. 01.a tahun 2007, tanggal 10 September 2007 tentang pendirian fakultas-fakultas di lingkungan UMRAH). FIKP merupakan fakultas yang pertama kali menerapkan implementasi kebijakan SIPA bersamaan dengan Fakultas Teknik (FT).

Kondisi yang terjadi saat ini mengenai implementasi kebijakan SIPA di FIKP memperlihatkan bahwa implementasi tersebut belum berjalan secara kondusif sebagaimana yang diharapkan, sesuai dengan tujuan diciptakannya SIPA. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan SIPA tersebut. Oleh karena itu, perlu

kiranya dianalisis secara mendalam dengan cara melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan SIPA di FIKP UMRAH.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, terdapat beberapa gejala yang membutuhkan penanganan khusus mengenai implementasi kebijakan SIPA di FIKP. Identifikasi masalah yang perlu ditangani diantaranya :

1. Kebijakan SIPA untuk mengatasi permasalahan akademik di FIKP UMRAH tidak berhasil mengatasi ketidakvalidan data akademik, terutama data aktivitas mahasiswa, sehingga dilakukan pengecekan manual oleh operator PDPT terhadap data aktivitas mahasiswa selama ini.
2. Adanya ketidakselarasan kewenangan struktur birokrasi akademik, dalam implementasi kebijakan SIPA. Sehingga sering terjadinya miskomunikasi dalam struktur birokrasi akademik UMRAH.
3. Tidak terlasananya pengembangan program SIPA hingga saat ini dalam mengatasi permasalahan akademik. Ditandai

dengan program dan jaringan internet yang belum benar-benar mendukung dalam proses implementasi kebijakan SIPA di FIKP UMRAH.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan SIPA di FIKP dilakukan agar pelaksana pengelolaan akademik di fakultas yang disebut dengan Operator PDPT dan Tim Pengembangan SIPA UMRAH, serta BAKK UMRAH dapat meningkatkan peran beserta fungsinya dalam implementasi kebijakan tersebut. Sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini dialami dalam implementasi kebijakan SIPA di FIKP, segera dapat diatasi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi dengan cara melakukan penelitian. Adapun penelitian yang akan dilakukan dengan judul :

**“Implementasi Kebijakan Sistem InformasiI Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Peirkanan Universitas Maritim Raja Ali Haji”**

## **Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementas Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji?

## **Tujuan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dilaksanakannya penelitian ini, bertujuan untuk :

- a. Mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- b. Mengidentifikasi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sehingga lebih bermanfaat.
- b. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah

pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

c. Secara Praktis,

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat sebagai bahan masukan, dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- 2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan program Sistem Informasi Pengelolaan Akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

## **Kerangka Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Chief J.O. Udoji dalam Wahab (2014:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*an sanctioned course*

*of action addressed to a particular problem or group of related problems that effect society at large*” yaitu, sesuatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Suharto (2014:7) mendefinisikan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2013:5) menerangkan bahwa, kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum, dan sebagai hipotesis. Untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan implementasi kebijakan.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Webster dalam Wahab (2008:64) merumuskan implementasi diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu menimbulkan dampak/akibat

terhadap sesuatu. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Grindle dalam Winarno (2012:149), memberikan pandangannya tentang implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang dapat memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Wahab (2008:88) menyatakan bahwa :

“Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok). Dimana proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Selain itu pelaksana kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan hasil (*output*), dampak (*outcome*), dan manfaat (*benefit*), serta

pengaruh (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*)”.

Menurut A.G Subarsono (2005:89) menyatakan bahwa : keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Edward III dalam Widodo (2012:96) menyatakan bahwa, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

(*Communication*).

Komunikasi merupakan proses penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Hal ini bertujuan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami baik isi, tujuan, arah, maupun kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

2. Sumber daya (*Resources*).

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut merupakan sarana yang digunakan



untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan. Terbatasnya sumber daya akan menghambat proses implementasi kebijakan. Dimana aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak akan kuat, sehingga menyebabkan pelayanan tidak akan berjalan secara optimal.

### 3. Disposisi (*Dispositions*).

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan dapat terwujud. Apabila implementasi kebijakan ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka para pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pelaksana kebijakan juga harus mengetahui, memahami, dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga didalam praktiknya tidak terjadi bias.

### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan atau instansi yang menjalankan kebijakan tersebut. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan dari suatu kebijakan dapat dipahami sepenuhnya oleh orang-orang yang bertanggungjawab melaksanakan implementasi kebijakan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan dari ketentuan dan tujuan kebijakan tersebut sangat perlu dikomunikasikan secara tepat, jelas dan konsisten oleh pelaksana kebijakan.

### **3. Sitem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA)**

Sistem informasi akademik sebagai suatu sistem didalam suatu lembaga pendidikan yang merupakan

kombinasi orang-orang, fasilitas, teknologi, media dan prosedur-prosedur dalam mengolah, menyimpan dan mendistribukan data dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau akademik.

Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) adalah sistem administrasi akademik yang baru dikembangkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yang dilaksanakan oleh Tim SIPA sebagai Tim Pengembangannya, berdasarkan Surat Keputusan No.051/UMRAH/SK-KU/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Program SIPA meliputi alur kegiatan akademik, yaitu alur perkuliahan, diantaranya : pengimputan jadwal perkuliahan, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), persetujuan (validasi) KRS oleh Dosen Penasehat Akademik (PA) hingga penilaian. SIPA dapat diakses dengan cara membuka program *Web browser* seperti *Internet Explorer*, *Mozilla Firefox*, *Google Chrome*, dll. SIPA pada

dasarnya terdiri dari 8 *icon* (gambar), diantaranya : Isian Rencana Studi, Transkrip Nilai, Hasil Studi, Input Nilai Mata kuliah, Absensi Perkuliahan, Daftar Sesi Perkuliahan, Daftar Ruangan, Jadwal perkuliahan. Adapun kedelapan *icon* (gambar) tersebut dapat dilihat pada gambar

II.2 :

### Gambar II.2

#### Icon (gambar) Sitem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)



Sumber : Panduan Penggunaan SIPA UMRAH untuk Mahasiswa.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2012:14) penelitian deskriptif” yaitu: “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Adapun lokasi didalam penelitian ini adalah Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Data dalam penelitian terdiri dari :

1. Data Primer menurut Arikunto (2010:22) adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah informan-informan yang dilibatkan dalam penelitian untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti lapangan.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, Sugiyono (2012:225). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari FIKP, diantaranya adalah data aktivitas mahasiswa baik yang aktif, non aktif, cuti, lulus maupun keluar

yang dalam aplikasinya termasuk didalam implementasi kebijakan SIPA.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaksana pengelolaan akademik di FIKP. Sampel dalam penelitian ini disebut informan, diman informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang, yaitu : 1 orang Wadep I, 4 orang Ka. Prodi, 2 orang Tim Pengembangan SIPA UMRAH, dan 1 orang Operator PDPT. Penentuan sumber data pada informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Anggoro, dkk (2009:4.10) *purposive sampling* merupakan sampel yang anggota sampelnya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti, dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Wakil Dekan I FIKP ditetapkan sebagai sumber data utama (*key informan*). Karena Wakil Dekan I FIKP merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan akademik di FIKP, begitu pula dengan implementasi kebijakan SIPA di FIKP, dan dianggap sebagai sumber data yang

paling menguasai permasalahan implementasi kebijakan SIPA di FIKP.

Tekni pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisa dengan melakukan reduksi data, penarikan data dan penarikan kesimpulan dan dilakukan verifikasi data.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari pemberi pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan). Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, mamahami dari isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan. Hal ini bertujuan agar pelaku kebijakan dapat dapat mempersiapkan dengan benar apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, supaya tujuan dan sasaran dari

kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

#### **1. Kemampuan Memahami Isi, Maksud dan Tujuan Kebijakan Sistem Informaasi Pengelolaan Akademik oleh Pelaksana Kebijakan yaitu Operator PDPT, Dosen Pengajar Matakuliah dan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, maka pada indikator pemahaman isi, maksud dan tujuan dari kebijakan SIPA, baik operator PDPT, dosen maupun mahasiswa sudah memahami isi, maksud dan tujuan dari kebijakan SIPA tersebut. Pendapat dari beberapa informan tersebut, juga didukung oleh pendapat dari *key informan* atau informan pertama (i1), sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pertama (i1), tentang pemahaman isi, maksud, dan tujuan kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA).

Berikut hasil wawancara dengan *key informan* atau informan pertama (i1):

“Kalau saya lihat dari aturan main SIPA dalam panduan manual print penggunaannya, Operator PDPT di fakultas kami sudah paham akan hal itu, cuma permasalahan yang muncul diluar panduan manual print penggunaan SIPA memang menjadi kendala karena pengetahuan untuk memperbaiki permasalahan itu secara teknisnya tidak di operator kita tetapi di PTIK dan kita selalu konsultasi apabila ada permasalahan tersebut. Kalau saya lihat dari sisi Dosennya dengan adanya pedoman manual print SIPA dan semua dosen sudah mengetahui termasuk menggunakan akunnya begitu juga dengan mahasiswa setelah dilakukan sosialisasi sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh PTIK tersebut. Jadi saya rasa pada intinya semuanya sudah memahami isi, maksud dan tujuan dari kebijakan SIPA”. (Rabu, 15 April 2015).

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan pertama (i1), menunjukkan bahwa operator PDPT, dosen maupun mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan sudah memahami isi,

maksud dan tujuan dari kebijakan SIPA.

## **2. Kejelasan dan Konsistensi Penyampaian Informasi antara UPT PTIK dengan Operator PDPT, Dosen Pengajar Mata Kuliah, dan Mahasiswa di FIKP, Berkaitan dengan Perintah, aturan, dan Petunjuk Pelaksanaan SIPA.**

Penyampaian informasi sangat diperlukan oleh operator PDPT, dosen maupun mahasiswa, karena tanpa adanya informasi yang disampaikan maka proses implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Apabila pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran tidak mengetahui isi, maksud dan tujuan dari kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dilihat bahwa perintah, aturan maupun petunjuk pelaksanaan kebijakan SIPA sudah benar-benar jelas, hal tersebut karena disiapkannya panduan manual print penggunaan SIPA, akan tetapi dari sisi konsistensi perintah, aturan dan

petunjuk dari kebijakan SIPA yang belum konsisten dalam arti kebijakan masih sering berubah-ubah.

Menurut Informan kunci bahwa, indikator kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi kepada operator PDPT, dosen, dan mahasiswa, baik itu perintah, aturan maupun petunjuk pelaksanaan kebijakan SIPA sudah jelas dengan adanya panduan manual print penggunaan SIPA. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi. Dilihat dari konsistensi perintah, aturan dan petunjuk dari kebijakan SIPA yang memang belum konsisten. Karena sering terjadinya perubahan kebijakan, sejak awal digunakan SIPA sampai saat ini kebijakan yang diterapkan selalu mengalami perubahan di tengah-tengah pelaksanaannya. Dengan demikian maka dimensi Komunikasi dalam proses implementasi kebijakan SIPA di FIKP dapat dikatakan belum mendukung sepenuhnya implementasi kebijakan tersebut, karena baik perintah, aturan, dan petunjuk pelaksanaan SIPA belum konsisten, masih sering terjadinya perubahan kebijakan yang dilakukan.

Sehingga dalam pelaksanaannya membingungkan operator PDPT dalam mengimplementasikan kebijakan SIPA di FIKP.

Hal tersebut sesuai dengan teori Edward III (Widodo, 2012:97):“komunikasi kebijakan harus disampaikan secara jelas dan konsisten agar pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan mengetahui dan tujuan dan sasaran dari kebijakan”. Baik itu dalam penyampaian informasi maupun perintah dari kebijakan harus disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas dan konsisten, ketidakjelasan komunikasi dan perintah yang diterima oleh para pelaksana kebijakan akan membingungkan para pelaksana dalam melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan”.

#### **b. Sumber Daya**

Faktor sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan didalam penelitian ini meliputi ketersediaan sumberdaya manusia,

sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan, yang mendukung pelaksanaan kebijakan SIPA di FIKP. Adapun indikator dari dimensi sumberdaya diantaranya :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah ketersediaan atau jumlah Operator PDPT Prodi yang menjalankan implementasi kebijakan SIPA di FIKP, baik jumlah kapasitas maupun keahlian (kemampuan) dalam menjalankan tugas.

Sumberdaya manusia atau operator PDPT dalam menjalankan kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji masih kurang jumlahnya. Berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh operator PDPT FIKP dalam menjalankan kebijakan SIPA cukup baik, dan mampu menjalankan kebijakan SIPA.

Edward III dalam Widodo (2012:98) menegaskan bahwa : “Sumberdaya manusia (staf), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian)”. Dengan demikian

sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus cakap dalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu sumberdaya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan.

### **2. Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya anggaran berkaitan dengan biaya yang mendukung pengembangan program SIPA dan insentif yang diberikan kepada Operator PDPT Prodi dalam melaksanakan kebijakan SIPA di FIKP. Hampir semua informan menyatakan bahwa tidak mengetahui secara jelas tentang besaran anggaran yang dikeluarkan oleh universitas untuk pengembangan SIPA, apakah cukup atau tidak, berkaitan dengan insentif dinilai dari beban kerja operator masih kurang, mungkin besaran insentif yang dikeluarkan oleh Universitas sudah ada standar bakunya.

Edward III dalam Widodo (2012:100) menyatakan bahwa :

“Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mendapatkan insentif yang tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menyebabkan gagalannya pelaksanaan program”.

Berkaitan dengan hal tersebut Van Horn dan Van Metter dalam Widodo (2012:100) menyatakan bahwa : “Terbatasnya insentif tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup”.

### **3. Sumberdaya Peralatan**

Sumberdaya peralatan berkaitan dengan peralatan yang digunakan pengelola akademik dalam mendukung proses implementasi kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP).

Berdasarkan hasil yang didapat menunjukkan bahwa peralatan yang digunakan dalam mendukung proses implementasi kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), tidak mendukung dalam proses implementasi tersebut.

Edward III dalam Widodo (2012:102) menegaskan: “Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalannya pelaksanaan kebijakan. Karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan”.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dimensi Sumberdaya pada implementasi kebijakan SIPA di FIKP juga tidak



mendukung proses implementasi kebijakan tersebut. Karena kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki, dan kurangnya sumberdaya peralatan yang digunakan, menghambat proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan di FIKP. Sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan SIPA di FIKP menjadi tidak efektif.

Hal tersebut sesuai dengan teori sumberdaya Edward III yang menegaskan bahwa : “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi tersebut tidak akan efektif”. Edward III dalam Widodo (2012:98)

### **c. Disposisi**

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para

pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan dapat terwujud. Apabila implementasi kebijakan ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka para pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Disposisi dalam penelitian ini merupakan sipat dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan kebijakan SIPA di FIKP, seperti komitmen, kejujuran, dan intensitas.

#### **1. Komitmen yang dimiliki oleh Operator PDPT FIKP dalam mengimplementasikan kebijakan SIPA.**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa komitmen yang dimiliki oleh operator PDPT dalam menjalankan kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Mritim Raja Ali Haji cukup tinggi.

## **2. Kejujuran yang dimiliki oleh Operator PDPT FIKP dalam mengimplementasikan kebijakan SIPA.**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa operator PDPT dalam menjalankan kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki kejujuran yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

## **3. Intensitas atau semangat yang dimiliki oleh Operator PDPT FIKP dalam mengimplementasikan kebijakan SIPA.**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa pada indikator semangat yang dimiliki oleh operator PDPT dalam menjalankan kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji cukup tinggi.

Dengan demikian maka dimensi Disposisi dalam implementasi kebijakan SIPA di

FIKP, dapat disimpulkan bahwa dimensi Disposisi sudah mendukung proses implemetasi kebijakan SIPA di FIKP sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci dan beberapa informan lainnya, yaitu operator PDPT sebagai pelaksana memiliki komitmen, kejujuran dan semangat yang tinggi dalam pelaksanaannya dilapangan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Edward III dalam Widodo (2012:104) menyatakan : “Disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan”. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana kebijakan (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut”.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu badan atau instansi yang menjalankan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi dalam penelitian ini berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjalankan implementasi kebijakan SIPA. Menurut Edward III dalam Widodo (2012:106) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisiennya sturktur birokrasi”.

##### **1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses pelaksanaan implementasi kebijakan SIPA, dan fungsi dari SOP sebagai pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan SIPA di FIKP.**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses pelaksanaan kebijakan SIPA secara keseluruhan belum pernah dibuat atau tidak ada. Panduan yang digunakan oleh

pelaksana selama ini berdasarkan manual print penggunaan SIPA, dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi selama ini di fakultas, sehingga apabila terjadi kendala-kendala dilapangan, maka kendala-kendala tersebut tidak bisa langsung diantisipasi oleh pelaksana, dan menunggu pemecahannya dari pimpinan. Dengan demikian dari segi waktu tidak akan efisien.

##### **2. Pembagian tugas yang jelas agar proses implementasi berjalan efektif.**

Pembagian tugas yang sudah ditetapkan dengan jelas sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Akademik (SIPA) di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Karena dengan adanya pembagian tugas yang jelas maka setiap setiap lini dari pelaksanaan kebijakan akan memahami hal-hal yang menjadi tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* atau informan

pertama (i1), serta beberapa informan lainnya dapat dilihat bahwa dimensi Struktur Birokrasi belum mendukung dalam proses implementasi kebijakan SIPA di FIKP. Hal ini disebabkan karena SOP yang mengatur dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan implementasi tersebut belum ada, dengan demikian pembagian tugas yang jelaspun tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu panduan yang digunakan di FIKP berdasarkan kebiasaan-kebiasaan akademik yang selama ini dilakukan di FIKP dan disesuaikan dengan panduan manual print pelaksanaan SIPA. Selain itu sering terjadinya kesalahpahaman antara pelaksana akademik yaitu operator PDPT, PTIK dan BAKKS UMRAH. Sehingga menjadikan tidak efektifnya implementasi kebijakan SIPA di FIKP.

Pemahaman tersebut sesuai dengan teori Edward III dalam Agustino (2014:153) menegaskan bahwa yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah Struktur Birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung

kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Keputusan Menteri Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Suharto, Ing, dkk., 2012. *Perekayaan Metodologi Penelitian*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul., 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Joko., 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Subarsono, AG., 2005 *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi., 2012. *Kebijakan Publik* (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta. CAPS

Sugiyono., 2012, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Anggoro, Toha, dkk., 2009. *Metode Penelitian*. Universitas Terbuka. Jakarta.

<http://repository.upi.edu/1558/4/s>  
[PAUD 0902905](#)  
[CHAPTER1.pdf](#) (diunduh  
pada hari Selasa tanggal 14  
April 2015. Pukul 10.40 WIB.

Agustino, Leo., 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

